

PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

Dr. Ir. Hj. Khodijah Ismail, M.Si

khodijah@umrah.ac.id

HP. (+62)82323667888 ; (+62)819805778 ;

www.khodijahismail.com

POKOK BAHASAN

- Kontrak Perkuliahan, Terminologi serta Ruang Lingkup Ilmu dan Teknologi Kemaritiman (Ch 01&02)
- **Sejarah dan Perkembangan Kemaritiman Dunia, Indonesia dan Kepri (Ch 03)**
- Sosial Budaya Masyarakat Maritim : Pengertian, karakteristik, sistem sosial budaya dan SMD Maritim (Ch 04)
- Potensi Sumberdaya Kemaritiman (Ch 05&06)
- Ekonomi Maritim (Ch 07)
- UTS
- Pengembangan Teknologi Maritim (Ch 09)
- Pembangunan Kemaritiman Berkelanjutan (Ch10)
- Pencemaran Lingkungan dan Mitigasi Bencana Kemaritiman(Ch 11)
- Hukum Laut Internasional dan Zona Ekonomi Eksklusif, (Ch 12)
- IUUF (Ch 13)
- Pertahanan dan Keamanan Maritim (Ch 14)
- Kedaulatan Negara Maritim(Ch 15)
- UAS

SEJARAH KEMARITIMAN PERIODE AWAL KEMERDEKAAN HINGGA KINI

- sejarah kemaritiman di Indonesia, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu : periode kejayaan maritim, masa suram kemaritiman Nusantara (masa penjajahan) dan masa kemerdekaan

PERIODE AWAL KEMERDEKAAN (1945 - 1965)

- Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan beberapa peraturan hukum yang ditinggalkan Pemerintahan Hindia Belanda, termasuk landasan hukum bidang kelautan, yakni “Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939” (TZMKO).
- deklarasi keutuhan wilayah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957, yang dikenal dengan Deklarasi Djoeanda; konsep deklarasi Djoeanda ini memandang bahwa kepulauan Indonesia merupakan wilayah pulau-pulau, wilayah perairan, dan dasar laut di dalamnya sebagai suatu kesatuan politis, historis, geografis, ekonomis, dan sosial budaya.

PERIODE ORDE BARU (1966 - 1998)

- Pada era Orde Baru (1966-1998), nuansa pembangunan lebih diutamakan pada pembangunan daratan atau kontinental
- Pada tahun 1982, 119 negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Konvensi tersebut di dalamnya memuat 9 buah pasal mengenai perihal ketentuan tentang prinsip “Negara Kepulauan”. Salah satu pasal dalam prinsip Negara Kepulauan tersebut menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau yang satu dengan lainnya, yang kemudian diimplementasikan oleh Indonesia dengan istilah Wawasan Nusantara.

PERIODE REFORMASI (1998 - SEKARANG)

- Paradigma nasional yang mendukung visi kemaritiman selanjutnya adalah Deklarasi Bunaken yang dicetuskan tanggal 26 September 1998 pada masa pemerintahan Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie. Deklarasi ini pada dasarnya secara tegas menyatakan dua hal pokok yaitu kesadaran bangsa Indonesia akan geografik wilayahnya dan kemauan yang besar dari bangsa Indonesia untuk membangun kelautan.
- pada masa pemerintahan Gus Dur, tumbuh kesadaran bahwa potensi dan kekayaan yang ada di laut merupakan sumber ekonomi utama Negara
- tanggal 27 Desember 2001, bertempat di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa Jakarta, Presiden RI Megawati Sukarnoputri telah mencanangkan “Seruan Sunda Kelapa”. Pada intinya seruan tersebut mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim/kelautan,
- pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nomenklatur Dewan Maritim Indonesia (DMI) diganti menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) melalui Keppres No.21 Tahun 2007 dan menyelenggarakan konferansi kelautan dunia atau World Ocean Conference (WOC) di Manado pada tanggal 11 – 15 Mei 2009.

SEJARAH PERKEMBANGAN KEMARITIMAN SAMPAI ABAD KE-20

- Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan berdasarkan perjanjian Tordesillas thn 1494, ternyata memperoleh tantangan dari Inggris (di bawah Elizabeth 1) dan Belanda
- Konferensi Internasional utama yang membahas masalah laut teritorial ialah “codification conference” (13 Maret – 12 April 1930) di Den Haag, di bawah naungan Liga Bangsa Bangsa, dan dihadiri delegasi dari 47 negara.
- Konferensi ini tidak mencapai kata sepakat tentang batas Luar dari laut teritorial dan hak menangkap ikan dari negaranegara pantai pada zona tambahan. Ada yang menginginkan lebar laut teritorial 3 mil (20 negara), 6 mil (12 negara), dan 4 mil.

GEOSTRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA MENUJU POROS MARITIM DUNIA¹

OLEH: LETJEN TNI (MARINIR) PURN. DR. NONO SAMPONO, M,SI²

- Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 13 ribu pulau dengan sebagian besar wilayahnya (sekitar 70%) adalah berupa lautan yang sekaligus menjadi penghubung dua samudera utama dunia, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
- perairan laut di Indonesia dikenal sebagai salah satu daerah “*megabiodiversity*” penting di dunia dan juga mengandung potensi sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya buatan
- salah satu gambarnya adalah lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut dan 45 persennya setara USD 1.500 triliun pertahun barang dan komoditas diperdagangkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia³.

- Perkembangan Lingkungan Strategis Regional semakin menegaskan bahwa telah terjadi perubahan dan transformasi strategis tentang adanya pergeseran pusat geopolitik dan geoekonomi global ke kawasan Asia-Pasifik
- Indonesia harus mengambil peran sebagai Poros Maritim Dunia dalam rangka menciptakan stabilitas dan keamanan akibat terjadinya transformasi Geopolitik dan Geoekonomi di kawasan Asia-Pasifik.
- gagasan Poros Maritim Dunia juga sekaligus akan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang seharusnya dijalankan sesuai dengan karakteristik geografis yang dimilikinya sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dalam mewujudkan cita-cita utamanya melalui proses pembangunan nasionalnya
- dalam agenda pembangunannya ditetapkan lima pilar utama, yakni pembangunan budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan membangun kekuatan pertahanan keamanan maritim..